



PERANAN PENDIDIKAN JARAK JAUH DALAM PEMERATAAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU¹

Effendi Wahyono
effendi@mail.ut.ac.id

Kaca kunci: Pendidikan jarak jauh, pemerataan pendidikan, mutu pendidikan

Abstract

Distance education has a different characteristic from the conventional education. The first characteristics is the distance between teacher and learner. Knowledge transaction is not conducted by face-to-face but by using media, printed and non printed. The second characteristic is the open system, which means whoever and wherever can be the learner. Therefore, it can be said that distance education has flexibility and accessibility. The learners can choose their education program which is relevant to their needs. On the other hand, the distance education programs can be accessed by the learner anywhere and any kind of system.

The quality of a distance education is determined by the quality of learning material (printed and non printed), the learning process (tutorial and other learning support, the evaluation (material and administration), the learner ability in self directed learning, and the conducive society which support teaching learning activities. The whole process has to be supported by a good operational procedure through a quality assurance standard. Even though distance education has a mass characteristics, it can guarantee a qualified teaching learning process if all of the quality standard can be fulfilled.

¹ Paper disajikan dalam Simposium Nasional, Pendidikan Nasional 25-26 Juli 2007 di Hotel Bidakara, Jakarta

Makna Pendidikan Jarak Jauh

Pendidikan jarak jauh (PJJ) adalah suatu metode atau transaksi pembelajaran yang memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) keterpisahan antara pendidik dan peserta didik selama proses pembelajaran, (2) ada institusi pendidikan yang mempunyai peran penting dalam perencanaan dan pengembangan bahan pembelajaran, (3) penggunaan berbagai macam media pembelajaran dalam penyampaian materi pembelajaran, (4) komunikasi dua arah yang tak langsung secara tatap muka antara pendidik dan peserta didik, (5) terbatasnya frekuensi pembelajaran kelas atau kelompok, (6) penggunaan prinsip-prinsip industrialisasi dalam pengembangan, pengadaan, dan pendistribusian bahan pembelajaran, dan (7) individualisasi proses pembelajaran (Zuhairi, 2004).

Secara harfiah PJJ mengandung makna adanya keterpisahan atau jarak antara peserta didik dengan pendidik. Moore sebagaimana dikutip Pannen, berpendapat bahwa PJJ merupakan suatu transaksi antara peserta didik dan pendidik dalam suatu lingkup yang terpisah. Keterpisahan antara keduanya tidak semata hanya keterpisahan fisik, waktu, atau geografis, tetapi lebih merupakan konsep paedagogik tentang hubungan pendidik dan peserta didik. Keterpisahan ini menyebabkan terjadinya perilaku hubungan antara keduanya yang spesifik dan khusus yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Keterpisahan ini menyebabkan adanya kesenjangan pola hubungan antara peserta didik dan pendidik (Pannen, 1999: 16). Kesenjangan tersebut harus dijembatani melalui media.

Dalam konsep yang tradisional, media yang digunakan untuk melakukan transaksi antara pendidik dan peserta didik adalah korespondensi. Pendidikan korespondensi pada awalnya merupakan bentuk pendidikan orang dewasa yang sudah dikenal sejak abad ke-18 di Eropa. Proses pembelajaran dalam pendidikan korespondensi dilakukan melalui media bahan ajar cetak yang dikenal dengan *self-instruction texts* dengan dikombinasikan komunikasi tertulis dalam bentuk surat-menyurat antara peserta didik dengan pendidik (Pannen, 1999: 11). Secara formal PJJ tertua di dunia yang berbasis korespondensi dalam proses pembelajarannya adalah *University of South Africa* (UNISA). Universitas ini didirikan di Afrika Selatan pada tahun 1946 dengan menyelenggarakan PJJ dalam

skala besar. Pada tahun 1950-an Pemerintah Indonesia juga pernah menyelenggarakan kursus tertulis dengan sistem jarak jauh untuk pendidikan guru.

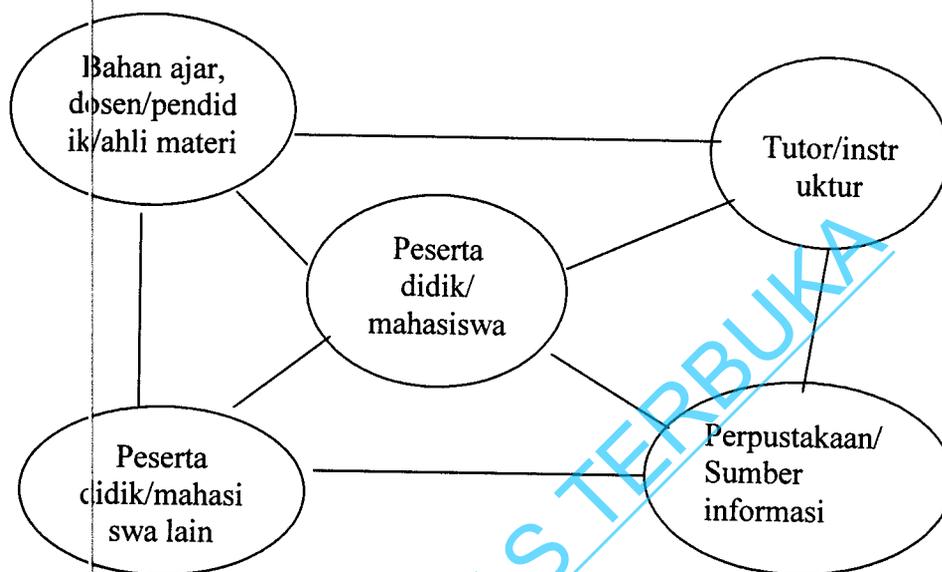
Perkembangan teknologi dan informasi membawa perubahan yang luar biasa dalam PJJ. PJJ tidak lagi diselenggarakan hanya dengan bahan ajar cetak, tetapi juga dilengkapi dengan bahan ajar non cetak, seperti komputer, audio/video, televisi, dan sebagainya. Bahan ajar diberikan dalam paket-paket multi media yang mudah dipelajari oleh peserta didik. *United Kingdom Open University* (UKOU) di Inggris adalah salah satu contoh lembaga PJJ modern pertama di dunia yang menggunakan bahan ajar multi media, baik media cetak maupun noncetak. UKOU banyak bekerja sama dengan *British Broadcasting Corporation* (BBC) dalam produksi dan penyiaran program audiovisual untuk pembelajaran jarak jauh.

Dalam perkembangan saat ini, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat menjembatani kesenjangan antara PJJ dengan pendidikan tatap muka. Kecenderungan yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini adalah semakin kaburnya istilah PJJ karena alat-alat komunikasi modern dapat menghilangkan masalah jarak yang memisahkan antara pendidik dan peserta didik mudarnya perbedaan antara belajar dengan sistem jarak jauh dengan sistem tatap muka ini terjadi karena teknologi yang ada saat ini dapat mengemas semua bentuk informasi dalam bentuk elektronik. Dalam kemasan elektronik digital, informasi dapat dikomunikasikan ke mana saja secara serentak dan interaktif (Soeprapto, 2004 : 172).

Prinsip dasar dari PJJ adalah aksesibilitas. Lembaga PJJ harus memberikan berbagai akses layanan yang dapat dipilih oleh peserta didik melalui berbagai media. Untuk akses ke bahan ajar misalnya, peserta didik memiliki otonomi untuk menentukan bahan ajar apa yang akan dimanfaatkan dalam mengikuti pelajaran. Peserta didik juga dapat menentukan sendiri cara belajar yang bagaimana, apakah memilih untuk belajar sendiri dengan mengakses sendiri ke sumber-sumber belajar (termasuk internet), apakah memilih untuk belajar berkelompok dan mengikuti program-program tutorial. Semua itu merupakan pilihan-pilihan yang memungkinkan dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa.

Dengan adanya prinsip aksesibilitas, peserta didik menjadi sentral dalam pemberian layanan. Artinya semua jenis layanan dalam pembelajaran ditujukan untuk

kepuasan mahasiswa. Dengan demikian proses belajar dalam sistem pendidikan jarak jauh bentuknya seperti forum komunikasi jaringan belajar, yang meliputi peserta didik sebagai subjek. Dengan demikian pola hubungan antara peserta didik dengan pendidik/dosen atau ahli materi pembelajaran, instruktur atau tutor, dan perpustakaan, masyarakat atau peserta didik yang lain, dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah:



Dalam konsep layanan tersebut, peserta didik mempunyai otonomi yang lebih besar dibandingkan dengan peserta didik dalam sistem tatap muka. Mahasiswa dalam sistem belajar jarak jauh memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan sendiri kapan mereka akan memulai dan menyelesaikan belajarnya serta program studi apa yang mereka inginkan. Dengan dasar tersebut maka program-program pendidikan yang dikembangkan lembaga PJJ harus bersifat fleksibel.

Dengan sifatnya yang fleksibel, layanan pendidikan jarak jauh dapat dikembangkan dengan prinsip pendekatan konsumen, dalam arti bahwa semua layanan PJJ diarahkan kepada kepuasan peserta didik, dengan prinsip apa yang mereka (baca peserta didik) inginkan, di mana mereka inginkan, dan kapan mereka inginkan

(“Flexible Learning and the Library: The Challenge”, http://www.westga.edu/~library/jlsde/vol1/2/Jclark_Rstore.html). Fleksibilitas dapat dijalankan dalam sistem PJJ karena adanya sistem yang terbuka. Dengan demikian, PJJ juga mengandung makna pendidikan terbuka. Itulah sebabnya lembaga PJJ tidak sedikit diberi nama pendidikan terbuka, misalnya SMP Terbuka, Universitas Terbuka, *United Kingdom Open University*, *Open University Hongkong*, *Open University Malaysia*, *Indira Gandhi National Open University*, *Sukothai Thammatirat Open University*, dan sebagainya.

Pemerataan Kesempatan Belajar

Pemerataan pendidikan bukan sekadar membangun sekolah di mana-mana, tetapi yang lebih penting adalah membangun sekolah yang mudah dijangkau oleh semua peserta didik. Penyelenggaraan PJJ secara umum didasarkan atas dua isu besar, yaitu tuntutan pemerataan kesempatan belajar dan terbatasnya daya jangkau pendidikan tatap muka. Pendidikan bukan lagi menjadi sesuatu yang elitis tetapi menjadi lebih egaliter. Bahkan, dalam konstitusi negara Indonesia pendidikan menjadi hak setiap warga negara sehingga pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara yang berkeinginan dan mempunyai kemampuan untuk mengikuti pendidikan. Di sisi lain, daya jangkau lembaga pendidikan dengan sistem konvensional sulit dapat menjangkau dan dijangkau oleh orang yang memiliki kemauan dan kemampuan tersebut. Ada orang yang memiliki kemauan dan kemampuan intelektual yang tinggi tetapi tidak memiliki kesempatan untuk hadir kuliah tatap muka setiap hari di kampus-kampus konvensional tatap muka karena sesuatu hal sesuatu hal misalnya karena kesibukan pekerjaan atau karena tempatnya jauh dari kota besar dan tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mendatangi kampus-kampus tatap muka.

Dalam sejarah pendidikan tinggi, lahirnya Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ) umumnya dilatarbelakangi oleh adanya perluasan daya jangkau perguruan tinggi tatap muka. Contohnya adalah *University of London* di Inggris. Universitas ini didirikan pada tahun 1830 sebagai institusi yang melaksanakan pengujian dan pemberian gelar, sementara proses pembelajaran dilaksanakan oleh institusi lainnya. Mahasiswa yang berada baik di wilayah Inggris Raya maupun di daerah-daerah koloninya dapat

menempuh ujian untuk mendapatkan gelar dari *University of London*. Dengan cara ini *University of London* dapat menjangkau mahasiswa yang tersebar di berbagai penjuru baik di wilayah kerajaan Inggris maupun di daerah-daerah koloninya. Pada perempat terakhir abad ke-19, *University of Chicago* dan *Illinois Wesleyan College* di Amerika Serikat memperkenalkan program ekstensi sebagai suatu cara untuk menjangkau warga masyarakat yang tidak dapat mengikuti program tatap muka di kampus universitas yang bersangkutan. Pada tahun 1950-an *University of New England*, Australia didirikan dengan misi menyelenggarakan program pendidikan tatap muka dan jarak jauh sekaligus dalam rangka perluasan daya jangkau (Zuhairi, 2004).

Di Indonesia, berdirinya Universitas Terbuka tahun 1984 dilatarbelakangi oleh adanya isu-isu besar dalam dunia pendidikan, yaitu rendahnya daya tampung perguruan tinggi konvensional, dan rendahnya mutu pendidikan. Ledakan lulusan SLTA pada akhir Pelita IV yang besarnya mencapai 1,5 juta lulusan sementara itu daya tampung perguruan tinggi negeri yang ada hanya sekitar 400 ribu. Dengan kondisi tersebut diperkirakan ada sekitar 700 ribu lulusan SLTA yang tidak mendapatkan kesempatan belajar di perguruan tinggi. Untuk dapat menampung lulusan SLTA itu perlu ada perencanaan daya tampung perguruan tinggi sampai 1,5 juta mahasiswa, dengan asumsi bahwa semua lulusan SLTA ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Penambahan daya tampung yang besar itu, di samping memerlukan ruangan yang cukup besar dengan dana yang juga tidak sedikit, akan menimbulkan masalah baru, yaitu penambahan tenaga pengajar yang diperkirakan akan mencapai 80.000 – 90.000 orang. Meskipun dana yang diperlukan untuk mengembangkan dapat disediakan, penambahan 80.000 dosen sampai akhir Pelita IV (selama 5 tahun) tidak mungkin dapat dicapai (Direktorat Pembinaan Sarana Akademik, 1982: 6).

Masalah lain adalah rendahnya mutu pendidikan terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada akhir dasawarsa tahun 1970-an banyak guru SLTP dan SLTA yang dididik secara darurat dalam bentuk program singkat sehingga belum memenuhi standar kemampuan yang disyaratkan untuk mengajar di sekolah-sekolah pada tingkat pendidikan tersebut. Upaya untuk meningkatkan pendidikan guru (D2 untuk SLTP dan S1 untuk SLTA) setelah mereka bekerja ternyata tidak mudah karena adanya kendala biaya dan waktu. Mereka harus meninggalkan tugas mengajarnya. Pada tahun

1981 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melaksanakan program pendidikan jarak jauh PGSLP D2 bagi guru sekolah lanjutan tingkat pertama (SLP) yang telah memiliki ijazah D1 dan PGSLP. Program ini diberi nama Program Belajar Jarak Jauh Proyek Pengembangan Pendidikan Diploma Kependidikan. Untuk menyelenggarakan proses pendidikannya dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Belajar Jarak Jauh di 12 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Untuk memperluas daya jangkauan dalam rangka pemberian kesempatan yang lebih luas bagi warga negara Indonesia yang ingin mengikuti pendidikan tinggi, pemerintah memutuskan membuka sebuah universitas negeri yang sifatnya terbuka dengan sistem belajar jarak jauh. Ada beberapa pertimbangan mengapa lembaga PJJ yang dipilih: Pertama, PJJ tidak memerlukan dosen tetap dengan jumlah yang banyak. Kedua, sumber daya pendidikan tinggi yang ada dapat dimanfaatkan untuk membantu penyelenggaraan sistem belajar jarak jauh tanpa mengganggu tugas pokok mereka. Ketiga, pendidikan jarak jauh tidak memerlukan banyak ruangan. Keempat, biaya pendidikan relatif lebih murah bila dibandingkan dengan pendidikan sistem tatap muka. Kelima, pendidikan jarak jauh dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi pendidikan. Melalui teknologi pendidikan penyampaian pendidikan dapat dirancang dengan sedikit mungkin sumber daya manusia tetapi dapat mengakibatkan terjadinya suasana dan kemauan belajar mahasiswa sehingga dapat mengakibatkan pula terjadinya suatu perubahan perilaku pada mahasiswa. Dengan demikian, melalui pemanfaatan media pendidikan, sistem belajar jarak jauh tidak berbeda kualitasnya dengan sistem belajar tatap muka. Kelebihannya, dengan menggunakan media cetak maupun elektronik (audio/video) sistem belajar jarak jauh dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa dengan melibatkan staf pengajar yang jauh lebih sedikit, karena dimensi ruang dan waktu tidak lagi menjadi penentu.

Perkembangan Teknologi komunikasi memungkinkan berbagai lembaga menyelenggarakan PJJ. Keinginan perguruan tinggi tatap muka membuka PJJ mendorong Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan yang berisi rambu-rambu penyelenggaraan PJJ. Pada tahun 1991 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan No. 0564/u/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh. Dalam pasal 4, ayat 1 Keputusan itu dijelaskan bahwa pendidikan tinggi jarak jauh diselenggarakan oleh Universitas Terbuka dan perguruan tinggi lain yang diberi tugas

untuk melaksanakannya melalui program studi pendidikan jarak jauh. Ayat 2 menyebutkan bahwa penugasan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Menteri atas usul Direktur Jenderal. Pada pasal 8 disebutkan bahwa syarat dan tata cara pendirian universitas terbuka diatur oleh Menteri.

Dengan keluarnya Keputusan Menteri itu, pendidikan tinggi jarak jauh tidak lagi menjadi monopoli UT. Pendidikan tinggi lain mendapatkan peluang untuk membuka atau menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh asalkan mendapat persetujuan atau penugasan dari Departemen Pendidikan. Peluang perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan jarak jauh juga secara tidak langsung sudah diwadahi dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999.

Keberadaan pendidikan jarak jauh semakin jelas dalam dunia pendidikan di Indonesia dengan keluarnya Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 13 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa pendidikan dapat diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Selanjutnya, dalam pasal 31 disebutkan bahwa:

- 1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.
- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Aturan rinci dari Pemerintah yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 107 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh. Keputusan Menteri ini

mengatur tata cara dan persyaratan penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Syarat-syarat penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 keputusan itu adalah bahwa program pendidikan tinggi jarak jauh diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memang memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain: pertama, punya sumber daya untuk merancang, menyusun, memproduksi, dan menyebarluaskan seluruh bahan ajar yang diperlukan untuk memenuhi kurikulum program.

Kedua, bekerja sama dengan perguruan tinggi lain yang sudah mempunyai izin penyelenggaraan program studi yang sama untuk memfasilitasi kegiatan pengembangan program dan bahan ajar, pemberian layanan bantuan belajar, layanan perpustakaan, pelaksana praktikum dan pematapan pengalaman lapangan, serta penyelenggaraan evaluasi hasil belajar secara jarak jauh; ketiga, mempunyai sumber daya untuk memutakhirkan secara berkala setiap bahan ajar yang diproduksi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; keempat, mempunyai sumber daya untuk menyediakan fasilitas praktikum dan/atau akses bagi mahasiswa untuk melaksanakan praktikum; kelima, sudah mempunyai izin penyelenggaraan program studi secara tatap muka dalam bidang studi yang sama, yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Pendidikan Tinggi dengan nilai A atau U (unggulan). Penyelenggara juga diwajibkan membuat laporan pelaksanaan dan menyampaikan laporan kepada Menteri Pendidikan Nasional secara berkala setiap tahun.

Dalam pasal 3 Keputusan Menteri No. 107 tersebut juga dipaparkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh dilaksanakan dengan mengutamakan: (a) penggunaan berbagai media komunikasi yang berbentuk media komunikasi tercetak dikombinasikan dengan media lain; (b) penggunaan metode pembelajaran interaktif yang didasarkan pada konsep belajar mandiri dengan dukungan bantuan belajar dan fasilitas pembelajar. Bahan ajar dikembangkan dan dikemas dalam bentuk tercetak, dikombinasikan dengan media yang dapat digunakan mahasiswa untuk proses belajar mandiri (*Kompas*, 25 September 2001).

Hal yang perlu digarisbawahi dari Keputusan itu adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh harus dilaksanakan melalui suatu jaringan kerja sama dengan

perguruan tinggi lain. Kerja sama itu diperlukan dalam kaitannya dengan penyediaan penulis bahan ajar, penulis soal, distribusi bahan ajar, penyediaan tutor dan ruang tutorial, penyelenggaraan praktikum, pemanfaatan perpustakaan, dan penyelenggaraan ujian. Dari bentuk kerja sama itu, penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh sebenarnya merupakan penyelenggaraan jaringan mata rantai pendidikan antarperguruan tinggi.

Kebijakan keputusannya Menteri tentang pendidikan tinggi jarak jauh merupakan salah satu perwujudan peningkatan sumber daya manusia yang menjadi salah satu program Pendidikan Nasional. Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia Departemen Pendidikan menetapkan empat kebijaksanaan pokok dalam bidang pendidikan, yaitu pemerataan dan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan, dan efisiensi pendidikan.

Aspek pemerataan kesempatan yang ingin dicapai Departemen pendidikan mengandung tiga arti, yaitu persamaan kesempatan, aksesibilitas, dan keadilan atau kewajaran. Ekuualitas berarti bahwa setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan. Aksesibilitas mengandung arti bahwa setiap orang, tanpa memandang asal-usulnya mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan pada semua jenis, jenjang, serta jalur pendidikan. Keadilan mengandung arti adanya "perbedaan" perlakuan menurut kondisi internal dan eksternal peserta didik. Adalah adil jika peserta didik diperlakukan menurut bakat, minat, dan kemampuannya. Aspek relevansi dapat dilihat sebagai keterkaitan antara pendidikan dengan kebutuhan pembangunan.

Mutu Pendidikan Jarak Jauh

Secara umum mutu pendidikan tergantung pada mutu masukannya atau peserta didiknya. Tidak heran sekolah-sekolah bermutu menyeleksi masukannya secara ketat dengan standar yang tinggi. Bila mutu masukkan peserta didik baik, dampaknya juga akan menghasilkan peserta didik yang bermutu baik. Sebaliknya bila peserta didik yang masuk tidak bermutu, sulit bagi lembaga pendidikan untuk menghasilkan peserta didik dengan kualitas yang baik. Masalahnya pada lembaga pendidikan jarak jauh hampir tidak melakukan seleksi terhadap masukannya. Karena itu, dalam PJJ masukkan bukan satu-satunya tolok ukur untuk menentukan mutu peserta didik. Di samping kecerdasan otak, peserta PJJ harus memiliki kemampuan yang kuat untuk mendisiplinkan diri belajar

mandiri. Proses belajar suatu lembaga PJJ dapat bermutu baik jika didukung oleh bahan ajar yang baik, pelaksanaan tutorial dan pemberian dukungan belajar lainnya yang baik, dan mutu ujian, serta prosedur operasional yang memadai (Setijadi, 2005).

Bahan ajar PJJ yang baik harus dikembangkan oleh sebuah tim yang terdiri atas ahli materi, ahli desain instruksional, ahli teknologi informasi dan komunikasi, ahli bahasa, ahli evaluasi, dan pustakawan.

Ahli materi, yaitu mereka yang menentukan dan, pada umumnya, juga ikut mengembangkan mata pelajaran pada PJJ. Ahli materi ini kemudian ditempatkan sebagai anggota tim pengembang mata pelajaran yang tugasnya menentukan materi apa yang perlu dipelajari peserta didik.

Ahli desain instruksional, bertugas untuk mendesain mata pelajaran sehingga mudah dimengerti dan mempunyai unsur-unsur interaktif di dalamnya. Karena itu ahli desain ini harus ahli dalam media yang digunakan, mengerti tentang prinsip-prinsip dan teknologi instruksional, dan pengetahuan tentang teknologi yang dipergunakan. Ahli desain instruksional ini harus bekerja sama erat dengan ahli materi untuk menentukan tujuan mata pelajaran, materi yang disampaikan, latihan-latihan dan aktivitas lain yang harus dikerjakan peserta didik, tata letak bahan ajar, isi dari media video dan audio yang digunakan, dan pertanyaan-pertanyaan untuk bagian interaktif bahan ajar yang disampaikan melalui media audio, video, atau komputer. Keahlian desain ini juga beragam, tergantung dari media yang digunakan.

Ahli teknologi informasi dan komunikasi, bertugas membantu menyampaikan bahan ajar melalui teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan. Media itu dapat berupa cetakan, audio dan/atau video melalui radio, televisi atau komputer. Di sini pun keahliannya beragam, sesuai dengan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan.

Ahli bahasa, bertugas untuk memastikan bahan ajar ditulis dan disampaikan dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa yang benar dan komunikatif sehingga mudah untuk dipelajari sesuai dengan prinsip-prinsip belajar mandiri.

Ahli evaluasi pendidikan. Dalam lingkup mata pelajaran bertugas untuk mengembangkan segala jenis test hasil belajar dan test lain yang diperlukan, sehingga ada jaminan tes-tes dan soal-soal yang diberikan dapat digunakan untuk mengukur

tercapainya tujuan suatu mata pelajaran. Dalam lingkup institusi PJJ ahli ini bertugas untuk mengembangkan pusat penilaian, yang tidak hanya mengembangkan test, tetapi juga mengkalibrasinya dan menyimpannya dalam suatu bank soal. Selain itu mereka juga dapat diberi tugas untuk mengembangkan tugas mandiri bersama dengan program studi.

Pustakawan, bertugas membantu menelusur dan menyediakan bahan-bahan pustaka dan informasi lainnya yang diperlukan dalam penyusunan bahan ajar.

Mutu bahan ajar yang baik ini harus didukung oleh manajemen pengadaan bahan ajar dan distribusi bahan ajar yang baik untuk menjamin ketersediaan bahan ajar yang diterima oleh peserta didik dalam waktu yang tepat. Peserta didik harus memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari bahan ajar sesuai dengan aturan yang berlaku umum dalam pembelajaran dengan sistem SKS. Keterlambatan dalam pendistribusian bahan ajar akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran PJJ, yang dampaknya adalah penurunan kualitas peserta didik terhadap penguasaan materi pembelajaran.

PJJ memiliki keterbatasan dalam hal pertemuan tatap muka. Tetapi lembaga PTJJ di manapun menyediakan fasilitas tutorial beberapa mata pelajaran kepada mereka yang membutuhkan. Karena itu institusi PJJ harus memiliki ahli tutorial. Ahli tutorial bertugas terutama untuk melaksanakan interaksi antara pendidik dan peserta didik, membantu dan mendorong adanya interaksi antarpeserta didik. Pada pendidikan tatap muka interaksi ini dijalankan sendiri oleh pengajar yang sekaligus juga ahli materi, Akan tetapi dalam PJJ hal itu kurang mungkin mengingat, bahwa jumlah mahasiswa pada umumnya lebih banyak dari jumlah sebuah kelas, dan tempat tinggal mereka juga berjauhan. Interaksi dalam PJJ juga tidak dapat dilaksanakan secara intensif seperti dalam pendidikan tatap muka, akan tetapi hanya kadang-kadang. Lagipula memang lebih baik interaksi pada PJJ bukan dilaksanakan oleh mereka yang mengembangkan bahan ajar, akan tetapi oleh orang lain (tutor), yang memang terlatih untuk mengadakan interaksi dengan mahasiswa, sedangkan tim pengembang belum tentu mempunyai kemampuan untuk itu.

PJJ memerlukan kesiapan bagi peserta didik untuk dapat disiplin belajar mandiri. Karena itu diperlukan konselor untuk membantu peserta didik menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam belajar, memberikan pengertian tentang teknik-teknik belajar yang diperlukan dalam belajar mandiri, atau membantu menyelesaikan masalah-masalah akademik atau pribadi.

Penutup

Isu yang paling kritis dalam PJJ adalah mutu. Hal itu disadari oleh semua lembaga PJJ. Beberapa lembaga PJJ secara khusus mengadakan divisi atau pusat yang tugasnya mengontrol kualitas setiap unit kerja. Sukhothai Thamathirat Open University, Thailand, Open University Hongkong, dan Universitas terbuka merupakan beberapa contoh PJJ yang memiliki Pusat Jaminan Kualitas.

Asosiasi lembaga pendidikan jarak jauh Asia (AAOU) telah menyusun kerangka acuan standar baku penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang berkualitas. Kerangka acuan ini yang dijadikan dasar penilaian atas kelayakan penyelenggaraan PJJ. Standar kualitas ini setiap tahun dievaluasi dalam setiap konferensi tahunan yang diikuti oleh anggota AAOU. Di samping itu, sejak 2003 International Council for Distance Education (ICDE) sebuah organisasi penyelenggara pendidikan jarak jauh tingkat dunia mendirikan ICDE Standard Agency (ISA) yang bertugas melakukan penilaian kualitas PJJ. ICDE beranggotakan 142 lembaga penyelenggara pendidikan tinggi di seluruh dunia. Seperti halnya AAOU, ICDE juga menyelenggarakan konferensi tahunan yang membahas isu-isu di sekitar penyelenggaraan PJJ.

Materi pembelajaran (baik dalam bentuk cetak maupun non cetak) dalam PJJ dapat diakses oleh semua orang. Dengan demikian kualitas materi pembelajaran dalam PJJ dapat dinilai oleh setiap orang.

Dalam Negara kepulauan yang luas seperti Indonesia, PJJ dapat berperan dalam pemerataan pendidikan, pemberian kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan, dengan materi pembelajaran yang dapat dikontrol oleh masyarakat. PJJ juga dapat menghasilkan standar mutu yang merata. Dengan kenyataan yang demikian, PJJ dapat membantu dalam mengembangkan standardisasi mutu pendidikan.

Daftar Pustaka

- Daniel, John dan Wayne Mackintosh. 2003. Leading ODL Futures in the Eternal Triangle: The Mega-University Response to the Greatest Moral Challenge of Our Age; dalam Michael Graham Moore dan William G. Anderson (Ed). *Handbook of Distance Education*.
- Daniel, John. 1996. *Mega-Universities and Knowledge Media. Technology Strategies for Higher Education*. London: Kogan Page, 1996.
- Direktorat Sarana Akademis (1982). "Konsep Rancangan Universitas Terbuka: (Draft tidak diterbitkan). Jakarta: Direktorat Sarana Akademis, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moore, Michael Graham dan Greg Kearsley. 1996. *Distance Education. A Systems View*. London: Wadsworth Publishin Company.
- Open University Malaysia, 2003. *Prospectus 2002/2003*. Universiti Terbuka Malaysia.
- Setijadi, 2005 "Pendidikan Jarak Jauh dalam Konteks Pendidikan Nasional", dalam Setijadi (ed), *Buku Pedoman Pendidikan Jarak Jauh*, Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- . Suparman, Atwi dan Aminudin Zuhairi 2004. *Pendidikan Jarak Jauh: Teori dan Praktek*. Jakarta: Pusat Penerbitan Bahan Pustaka
- Suparman, Atwi, 2004. "Universitas Terbuka Menuju Pusat Unggulan". Dalam Effendi Wahyono (Ed.). *20 Tahun Universitas Terbuka: Dulu, Kini, dan Esok*. Jakarta: Pusat Penerbitan Univeritas Terbuka
- Wahyono, Effendi, Setijadi, dan Suratinah, 2005 "Pendidikan Jarak Jauh dalam Tingkat Pendidikan Tinggi", dalam Setijadi (ed), *Buku Pedoman Pendidikan Jarak Jauh*, Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- White, Vernon. 1986. *Distance Education in Australia*. A Country Paper Presented at Regional Seminar on Distance Education, Bangkok.
- Zuhairi, Aminudin 2004. "Perkembangan dan Kontribusi Pendidikan Tinggi Jarak Jauh dalam Upaya Global Membangun Masyarakat Berbasis Pengetahuan". dalam Effendi Wahyono dkk (Ed.). *20 Tahun Universitas Terbuka: Dulu, Kini, dan Esok*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, hal.3-61
- Zuhairi, Aminudin, Effendi Wahyono, dan Suratinah, 2006, "The Historical Context, Current Development, and Future Challenges of Distance Education in Indonesia" *Quarterly Review of Distance Education*, 7 (1) p. 95-101

Efendi Wahyono, lahir di Tegal, 1960.

Pendidikan: S1 dan S2 dalam bidang sejarah dari UI.

Mahasiswa S3 dalam bidang yang sama, di Universitas yang sama.

Pekerjaan:

Tahun 1986 bekerja di UT sebagai staff Redaksi Majalah Paket di camping sebagai tenaga edukatif pada FISIP UT. Staf redaksi majalah Komunika dan majalah Suara Terbuka, UT, Editor Jurnal Studi Indonesia, UT. Kepala Perpustakaan UT 1995-2003.

UNIVERSITAS TERBUKA